

**STRATEGI PENGUATAN EKONOMI PROVINSI DIY  
BERBASIS SEKTOR UNGGULAN**

***STRATEGY OF ECONOMIC STRENGTHENING DIY PROVINCE  
BASED LEADING SECTOR***

Darmadji  
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Widyagama Malang

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan ditinjau dari: (1) total output, (2) nilai tambah bruto, (3) nilai ekspornya, (4) nilai dampak pengganda output, dan (5) nilai indek daya penyebaran dan derajat kepekaan. Penelitian ini menggunakan analisis Input Output yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Metode penggalan data dilakukan dengan metode non surve, yaitu memanfaatkan data IO yang diterbitkan oleh BPS Provinsi DIY tahun 2010.

Berdasarkan hasil analisis dapat ditunjukkan. (A) sektor ekonomi potensial berdasarkan outputnya adalah: (1) sektor konstruksi gedung & bangunan sipil, (2) jasa pendidikan, (3) penyedia makan minum, (4) administrasi pemerintah, pertahanan & jaminan sosial wajib, (5) informasi dan komunikasi, (6) perdagangan eceran besar dan eceran selain mobil/motor, (7) real estate, (8) konstruksi khusus, (9) industri makanan dan minuman lainnya, (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

(b) sektor ekonomi potensial berdasarkan NTB adalah: (1) sektor jasa pendidikan, (2) perdagangan besar dan eceran (3) informasi dan komunikasi, (4) penyedia makanan dan minuman, (5) konstruksi gedung dan bangunan.

(c) sektor ekonomi potensial berdasarkan ekspor adalah: (1) kebudayaan hiburan dan rekreasi, (2) industri furnitur, (3) industri pakaian jadi, (4) real estat, (5) jagung, (6) industri makanan dan minuman lainnya, (7) industri tekstil selain tenun dan batik, dan (8) angkutan rel

(d) sektor ekonomi potensial berdasarkan penyerapan tenaga kerja adalah: (1) grosir dan eceran di samping mobil / motor, (2) padi, (3) pelayanan pendidikan, (4) administrasi pemerintahan, pertahanan dan wajib jaminan sosial, (5) penyediaan makanan dan minuman, (6) konstruksi bangunan dan bangunan sipil, (7) unggas dan hasil, (8) singkong, (9) industri makanan dan minuman lainnya, dan (10) buah .

(e) sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan dampak pengganda output adalah: (1) industri beras, (2) asuransi dan dana pensiun, (3) industri tepung terigu dan tepung lainnya, (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (5) industri barang kimia kecuali pupuk dan pestisida, (6) konstruksi khusus, (7) industri barang dan barang lainnya dari karet, (8) industri biji-bijian kupas, coklat dan kembang gula (9) jasa keuangan lainnya, (10) angkutan jalan raya.

(f) sektor potensial berdasarkan nilai indek daya penyebaran adalah: (1) industri beras nilainya sebesar, (2) asuransi dan dana pensiun, (3) industri tepung terigu dan tepung lainnya kode 26 sebesar 1,2794, (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (5) industri barang kimia kecuali pupuk dan pestisida, (6) konstruksi khusus, (7) industri barang dan barang lainnya dari karet, (8) industri biji-bijian kupas, coklat dan kembang gula, (9) jasa keuangan lainnya, dan (10) angkutan jalan raya.

(g) sektor potensial berdasarkan nilai indek derajat kepekaan adalah: (1) sektor perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor (2) sektor informasi dan komunikasi 7, (3) sektor penyedia makan dan minum, (4) angkutan jalan raya, (5) listrik, (6) padi, (7) jasa

keuangan lainnya, (8) jasa lainnya, (9) administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib, (10) real estat.

**Kata kunci** : analisis IO, pengganda output, tenaga kerja, indek daya penyebaran dan derajat kepekaan

### **ABSTRACS**

*This study aims to determine the leading economic sectors in terms of: (1) the total output, (2) gross value added, (3) the value of exports, (4) the value of the output multiplier effects, and (5) the value of the spread and the power index degree of sensitivity. This study uses Input Output analysis developed by Wassily Leontief. Methods of data collection was conducted by non surve, which utilize IO data published by BPS DIY Province in 2010.*

*Based on the results of analysis can be shown. (A) potential economic sectors based on the output are: (1) construction of buildings and civil structures, (2) educational services, (3) providers of eating and drinking, (4) government administration, defense and compulsory social security, (5) information and communication, (6) retail trade and retail in addition to the car / motorcycle, (7) real estate, (8) a special construction, (9) other food and beverage industry, (10) health services and activities sosail.*

*(b) potential economic sectors based NTB are: (1) the education services sector, (2) wholesale and retail trade (3) information and communication, (4) a provider of food and beverage, (5) the construction of buildings and constructions.*

*(c) the potential economic sectors based export are: (1) the culture of entertainment and recreation, (2) the furniture industry, (3) apparel industry, (4) real estate, (5) corn, (6) other food and beverage industry , (7) the textile industry in addition to weaving and batik, and (8) freight rail*

*(d) the potential economic sectors based on the absorption of labor are: (1) wholesale and retail trade in addition to the car/motorcycle, (2) rice, (3) educational services, (4) government administration, defense and compulsory social security, (5) the provision of food and drink, (6) the construction of buildings and building civil, (7) poultry and outcome, (8) cassava, (9) other food and beverage industry, and (10) fruits.*

*(e) the potential economic sectors based on the output multiplier effects are: (1) the rice industry, (2) insurance and pension funds, (3) industrial flour and other, (4) health services and social activities, (5) industrial chemical goods except fertilizers and pesticides, (6) specialized construction, (7) industrial goods and other articles of rubber, (8) industry peeled grains, chocolate and confectionery (9) other financial services, (10) road transport highway.*

*(f) the potential sector based index value power deployment are: (1) the value of the rice industry, (2) insurance and pension funds, (3) industrial flour and other flour code 26 at 1.2794, (4) health services and social activities, (5) industrial chemical goods except fertilizers and pesticides, (6) specialized construction, (7) industrial goods and other articles of rubber, (8) industry peeled grains, chocolate and confectionery, (9) financial services other, and (10) of highway transportation.*

*(g) potential sector based index of the degree of sensitivity values are: (1) wholesale and retail trade sectors in addition to the car / motorcycle (2) the information and communication sector 7, (3) food and drink sector providers, (4) road transport, (5) electricity, (6) rice, (7) other financial services, (8) other services, (9) administration, defense and compulsory social security, (10) real estate.*

**Key words:** *IO analysis, the multiplier output, labor, power index spread and degree of sensitivity*

## PENDAHULUAN

Penelitian ekonomi baik yang berprespektif makro maupun mikro tetap penting untuk dilakukan, antara lain didasarkan pada realita bahwa sejak negeri ini berdaulat hingga pemerintah orde baru (orba), bidang ekonomi tetap ditempatkan sebagai persoalan bangsa yang diutamakan penanganannya. Pada masa orde lama (oral), komitmen pemerintah untuk mengedepankan penanganan persoalan di bidang ekonomi ditandai dengan dibentuknya Panitia Pemikir Siasat Ekonomi melalui Penpres No. 3 tanggal 12 April 1947. Kerja keras Panitia tersebut melahirkan dokumen perencanaan yang disebut Dasar Pokok Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Dokumen tersebut merupakan awal dari serangkaian perencanaan dalam sejarah pembangunan di Indonesia (Kunarjo,1996).

Pada masa Orba, komitmen pemerintah untuk tetap menempatkan bidang ekonomi sebagai persoalan utama bangsa, secara eksplisit tertuang dalam GBHN. Melalui serangkaian pembangunan berjangka yang populer dengan PJP I dan PJP II, kinerja ekonomi nasional yang kuat telah ditetapkan untuk bisa dicapai dalam 50 tahun kedepan sejak Pelita I tahun 1969. Yang berarti dalam 6 tahun kedepan cita-cita mewujudkan kinerja ekonomi yang kuat harus bisa dicapai. Demikian pula dalam

kontek perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam prespektif kurun waktu yang sama juga diharapkan untuk bisa mewujudkan kinerja ekonomi yang kuat.

Beberapa kriteria yang umumnya sering dipakai sebagai indikator kuat lemahnya kinerja ekonomi, diantaranya adalah: (1) laju pertumbuhan ekonomi, (2) jumlah penduduk miskin dan pengangguran, (3) pendapatan perkapita penduduk, (4) tingkat inflasi, (5) distribusi pendapatan penduduk, (6) kinerja ekspor, dan (7) pendapatan pajak. Penguatan ekonomi DIY sangat penting untuk terus dijaga bahkan ditingkatkan karena dua alasan utama. Pertama penguatan ekonomi DIY dengan berbagai indikator tersebut pada akhirnya bermuara pada upaya untuk menuju kemakmuran rakyat. Kedua, keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi pada akhirnya juga akan berdampak terhadap keberhasilan pembangunan dibidang yang lain.

Dalam penelitian ini penguatan ekonomi DIY hanya difokuskan pada kegiatan ekonomi (sektor) yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor, pendapatan pajak, pendapatan per kapita, dan penyerapan tenaga kerja yang potensial. Penguatan ekonomi Provinsi DIY menarik untuk ditelaah antara lain didasarkan pada beberapa alasan berikut:

(1) aspek kesatuan ekonomi, dan (2) kespesifikan perekonomian DIY diantara propinsi-propinsi lain, (3) sebagai provinsi yang paling kecil cakupan daerah administratifnya, namun laju pertumbuhan ekonomi yang masih rendah baik apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun apabila dibandingkan dengan dua provinsi lain di pulau Jawa.

#### **Alasan aspek kesatuan ekonomi.**

Pertimbangan aspek kesatuan ekonomi, dimaksudkan bahwa perekonomian DIY merupakan bagian integral dari perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, adanya berbagai upaya penguatan perekonomian di DIY juga akan berdampak luas yaitu tidak hanya terhadap perekonomian di wilayah provinsi lain tetapi juga terhadap perekonomian nasional.

#### **Alasan kespesifikan peran sektor pertanian terhadap perekonomian.**

Fakta kespesifikan kedua adalah didasarkan pada masih besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian DIY. Berdasarkan data PDRB dari tahun 2002-2006 yang disajikan pada Tabel 1 dapat ditunjukkan bahwa selama periode tersebut kontribusi sektor pertanian masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Fakta ini spesifik karena sejak awal PJP II yaitu pada tahun 1994 dalam pembangunan nasional sudah terjadi proses transformasi struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian. Sebaliknya kontribusi sektor industri menunjukkan kontribusi yang lebih tinggi dari sektor pertanian.

Tabel 1. Distribusi Struktur Ekonomi Secara Agregat dan Parsial 2002-2006

STRUKTUR EKONOMI AGREGAT (%)	TAHUN				
	2002	2003	2004	2005	2006
Pertanian	18,57	17,02	16,5	15,7	15,5
Industri Pengolahan	15,47	15,65	15,8	14,11	13,86
Jasa-Jasa	19,96	19,01	19,80	19,74	20,06
Perdagangan, hotel & restoran	19,17	19,21	18,9	19,14	19,03

Sumber: BPS DIY (2007; 2007a)

Dengan kata lain transformasi struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tidak terjadi di DIY. Fakta ini dianggap

spesifik karena proses transformasi yang umumnya dialami oleh provinsi-provinsi lain sudah terjadi sejak awal PJP II.

Kontribusi sektor pertanian yang masih cukup dominan terhadap

perekonomian juga masih berlanjut hingga tahun 2012. Berdasarkan struktur PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2012 dan tahun 2013 kontribusi sektor pertanian masing-masing adalah 14,65 dan 13,91. Sebaliknya kontribusi sektor industri pengolahan pada dua periode tahun yang sama adalah 13,34 dan 13,77 (BPS DIY, 2014).

Dalam perspektif makro, proses transformasi struktur ekonomi ini sangat penting karena Raul Prebisch *dalam* Widodo (1997), industrialisasi merupakan jalan satu-satunya bagi Negara berkembang untuk dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Demikian pula menurut Ridel (1992) bahwa industrialisasi merupakan salah satu jalur yang harus dilalui oleh hampir semua negara guna mencapai pendapatan perkapita yang tinggi.

Pendapat Widodo (1997) tersebut menarik untuk dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi DIY. Berdasarkan data perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY dari 2003-2012 rata-rata mencapai 4,7 %. Apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi lain di pulau Jawa, pertumbuhan DIY yang paling rendah. Pertumbuhan provinsi Jawa Timur rata-rata pertahun dalam periode tahun tersebut mencapai 5,97 %, Jawa Tengah sebesar 5,54 %, Jawa Barat

sebesar 5,93 %, Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,04 % (BPS Pusat, 2012). Masih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi DIY tersebut besar kemungkinan masih cukup besarnya kontribusi sektor pertanian.

Alasan kespesifikkan ketiga berkaitan dengan Visi pembangunan Provinsi DIY. Kespesifikkan ketiga ditinjau dari Visi Pembangunan DIY adalah keinginan untuk bisa unggul dibidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan terutama difokuskan pada pembangunan di sektor jasa pendidikan, jasa perdagangan selain mobil/motor, penyediaan makanan dan minuman, dan administrasi pemerintahan. Pembangunan keempat sektor tersebut diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor yang lain, seperti informasi dan komunikasi, konstruksi, serta real estat.

Visi pembangunan DIY tersebut menarik untuk dijadikan salah satu alasan penelitian ini karena menempatkan sektor jasa (tersier) sebagai dominasi pembangunan. Apabila dikaitkan dengan teori pertumbuhan ekonomi Rostow (1960) yang secara bertahap merumuskan 5 tahap pembangunan, yaitu bergerak dari *the traditional society, preconditions to take-off, the take-off, the drive to maturity, and the age of high mass-consumption*, visi pembangunan DIY merupakan kespesifikkan tersendiri.

Visi pembangunan DIY tersebut spesifik apabila dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur, yang potensi sumberdaya alamnya sama-sama berbasis pertanian, namun visi pembangunan hingga tahun 2025 nanti menjadikan sektor agribisnis sebagai *leading sector* (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, 2009).

Berkaitan dengan upaya untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi, Daryanto dan Hafizrianda (2010) menyatakan bahwa kunci keberhasilan pembangunan ekonomi adalah adanya integrasi ekonomi yang kuat, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan kata lain berkembangnya suatu sektor ekonomi sangat terkait dengan sektor ekonomi lain. Menurut Miller dan Blair (1985), salah satu model yang bisa memaparkan dengan jelas bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi itu terjadi adalah model Input Output (IO) yang dikembangkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930-an yang kemudian mendapata hadiah Nobel pada tahun 1973.

Menurut Leontief (1966), analisis IO merupakan suatu metode yang secara matematis mengukur hubungan timbal balik diantara beberapa sektor dalam perekonomian yang kompleks. Menurut Todaro (1986), gagasan dasar analisis IO didasarkan atas keyakinan bahwa perekonomian suatu negara dapat dibagi kedalam sejumlah sektor yang berbeda,

yang disebut industry (kadang-kadang 'kegiatan'), yang masing-masing terdiri dari satu atau lebih perusahaan yang menghasilkan produk yang hampir sama ayau tidak perlu saama. Tiap industry memerlukan masukan tertentu dari sektor-sektor lainnya untuk memproduksi keluarannya sendiri. Demikian pula masing-masing industry juga menjual sebagian dari keluarannya yang masih kasar ke industry-industri lainnya untuk memenuhi permintaan antara.

Menurut Chenery dan Clark (1959), setidaknya ada tiga asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis IO. (1) homogenitas, yang berarti suatu komoditas hanya dihasilkan secara tunggal oleh suatu sektor dengan susunan tunggal dan tidak ada substitusi antar berbagai sektor, (2) linieritas, ialah prinsip dimana fungsi produksi bersifat linier dan homogeny, dan (3) aditivitas ialah suatu prinsip dimana efek total dari pelaksanaan produksi dipelbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah.

Berdasarkan Tabel IO Provinsi DIY tahun 2010, sektor-sektor yang dikategorikan terkait dengan visi pembangunan DIY beserta sektor penunjang dan sektor ikutan yang terimbas, diantaranya adalah: (1) sektor pertanian, sebagai sektor pemasok kebutuhan makanan dan minuman, secara parsial terdiri dari 20 sektor, (2)

sektor pertambangan, garam kasar dan penggalian lain, (3) sektor industri pengolahan, terdiri dari: 13 agroindustri pengolahan makanan dan minuman, 8 agroindustri non makanan dan minuman, 14 sektor industri pengolahan berbasis non pertanian, (4) sektor industri gas dan air bersih, yang terdiri dari 3 sektor, (5) sektor konstruksi, terdiri dari 3 sektor pendukung, (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran, terdiri dari 3 sektor pendukung, (7) sektor pengangkutan dan komunikasi, terdiri dari 5 sektor pendukung, (8) sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan yang terdiri dari 9 sektor pendukung, (9) sektor jasa, terdiri dari 5 sektor jasa pendukung (BPS DIY, 2010).

Berdasarkan Tabel IO DIY 2010, secara parsial terdapat 83 sektor ekonomi yang menjadi penguat perekonomian Provinsi DIY. Dalam analisis IO, ke 83 sektor tersebut masing-masing memiliki beberapa potensi ditinjau dari: (1) output, (2) nilai tambah bruto (NTB), (3) ekspor, (4) penyerapan tenaga kerja, (5) dampak pengganda output, dan (6) indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Berdasarkan pada berbagai potensi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk memberikan deskripsi strategi penguatan ekonomi DIY berbasis sektor unggulan ditinjau dari: (1) nilai outputnya, (2) nilai tambah bruto, (3) nilai eksportnya, (4) nilai dampak

pengganda output, dan (5) nilai indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan.

Penentuan sektor unggulan menurut output dan NTB didasarkan pada BPS (1995). Menurut potensi total outputnya, BPS (1995) memberikan kategori sektor pemimpin (*leading sector*) untuk sektor-sektor yang memiliki total output dalam 10 besar diantara sektor-sektor perekonomian suatu wilayah. Sedangkan sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam 10 besar baik dalam hal total output dan NTB yang dihasilkan dikategorikan sebagai sektor kunci (*key sector*).

Di sisi lain, BPS (1995) juga memberikan kategori sektor kunci berdasarkan nilai indeks daya penyebaran dan nilai derajat kepekaan. Sektor-sektor ekonomi yang memiliki kedua nilai indeks tersebut lebih besar dari satu dikategorikan pula sebagai sektor kunci. Demikian pula menurut Budiharso (1989), Wibowo (1991), Daryanto dan Hafizrianda (2010). Penelitian ini menggunakan kedua indikator sektor kunci, yaitu baik berdasarkan nilai NTB dan output dan kedua nilai indeks suatu sektor.

Penentuan sektor unggulan ditinjau dari ekspor didasarkan pada BPS DIY (2010). BPS DIY (2010) memberikan stressing pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki total ekspor yang kontribusinya lebih atau sebesar 40

persen. Dengan demikian, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi 40 persen keatas dikategorikan sebagai sektor unggulan.

Penentuan sektor unggulan ditinjau dari dampak pengganda output maupun penyerapan tenaga didasarkan pada potensinya diantara 83 sektor ekonomi yang dianalisis. Dalam penelitian ini, sektor-sektor ekonomi unggulan ditinjau dari kdedua indictor tersebut apabila potensianya masuk dalam 10 besar. Kriteria ini bukan merupakan acuan yang baku karena tidak ada dasar yang kuat untuk membuat mengkategorikan suatu sektor unggulan ditinjau dari kedua indicator ekonomi tersebut.

Berdasarkan berbagai uraian mengenai pentingnya penguatan ekonomi DIY, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-ektor ekonomi unggulan ditinjau dari beberapa kriteria, yaitu berdasarkan: (1) total output, (2) nilai tambah bruto, (3) potensi ekspor, (4) penyerapan tenaga kerja, (5) dampak pengganda output, dan (6) nilai indek daya penyebaran dan indek derajat kepekaan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi masukan bagi penguatan ekonomi DIY di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Lingkup kajian dari penelitian ini adalah perekonomian Provinsi DIY.

Untuk mencapai tujuan berbagai tujuan yang telah diidentifikasi, penelitian menggunakan Metode Analisis Input Output Leontief. Data IO dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode non surve, yaitu hanya menggunakan data IO yang dberasal dari Tabel IO Provinsi DIY tahun 2010 dalam klasifikasi 83 sektor. Adapun tahapan analisis IO dalam penelitian ini meliputi:

(1) Pemilihan jenis tabel transaksi dan harga dasar yang digunakan.

Ada 3 jenis tabel IO yang diterbitkan BPS Yogyakarta (2010), yaitu: (i) tabel transaksi total, (ii) tabel transaksi domestik, dan (3) tabel berdasarkan marging perdagangan. Penelitian ini menggunakan tabel transaksi domestik. Di sisi lain, yaitu berdasarkan harga yang digunakan dalam transaskinya, ada dua jenis harga yang digunakan yaitu atas dasar harga pembeli dan atas dasar harga produsen. Penelitian ini menggunakan tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen. Berdasarkan atbel IO terpilih selanjutnya bisa dilakukan analisis secara deskripsi yang berkaitan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui sektor unggulan ditinjau dari nilai output, nilai tambah bruto dan nilai ekspor.

(2) Running tabel IO klasifikasi 83 sektor atas dasar harga produsen.

Running data pada tabel IO ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian ketiga dan keempat yaitu untuk



mengetahui sektor unggulan ditinjau dari dampak pengganda output dan nilai indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan. Adapun tahapan running analisis IO adalah : (1) penghitungan nilai koefisien input masing-masing sektor, (2) menghitung matrik kebalikan leontief, (3) menghitung nilai dampak pengganda output dan nilai indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan. Menurut BPS (1995), Budiharso (1989), dan Daryanto dan Hafizrianda (2010), nilai dampak pengganda output dihitung dengan rumus (1), nilai indeks daya penyebaran dihitung dengan rumus (2), dan nilai indeks derajat kepekaan masing-masing sektor dihitung dengan rumus (3).

$$MXT_j = \sum_{i=1}^{n+1} C_{ij} \dots \dots \dots (1),$$

$MXT_j$  adalah Pengganda output sektor  $j$   
 $C_{ij}$  adalah Unsur matrik kebalikan Leontief terbuka

$$r_j = \frac{\sum_{j=1}^n b_{ij}}{(1/n) \cdot \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots \dots \dots (2),$$

$$S_i = \frac{\sum_{i=1}^n b_{ji}}{(1/n) \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots \dots \dots (3)$$

$j$ : Indeks Daya Penyebaran,  $i$ : Indeks Derajat Kepekaan,  $n$  adalah jumlah sector  
 $b_{ij}$ : unsur matrik kebalikan Leontief terbuka pada baris ke- $i$  dan kolom ke- $j$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi sektor unggulan menurut total output

Menurut BPS (1995) dan BPS Provinsi DIY (2010), output adalah nilai produksi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi di suatu wilayah. Pentingnya melakukan kajian terhadap besarnya output yang diciptakan oleh masing-masing sektor, maka akan diketahui pula sektor-sektor apa saja yang mampu memberikan sumbangan yang besar dalam membentuk output secara keseluruhan di Negara/daerah tersebut.

Secara agregat, total output DIY adalah sebesar 114, 126 triliun rupiah. Berdasarkan hasil analisis terhadap 83 sektor ekonomi DIY, selanjutnya dapat diidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang potensi outputnya masuk dalam 10 besar. Ke 10 sektor ekonomi tersebut adalah: (1) sektor konstruksi gedung & bangunan sipil dengan kode sektor 59, nilainya sebesar 12,043 triliun rupiah (10,55%), (2) jasa pendidikan dengan kode 80, nilainya sebesar 10,078 triliun rupiah (8,83%), (3) penyedia makan minum kode sektor 68, nilainya 9,028 triliun rupiah (7,91%), (4) administrasi pemerintah, pertahanan & jaminan sosial wajib kode sektor 79, nilainya 7,83 triliun rupiah (6,86%), (5) informasi dan komunikasi kode 69, nilainya 7,492 triliun rupiah (6,56%), (6) perdagangan eceran besar dan eceran selain

mobil/motor kode 61, nilainya 6,786 triliun rupiah (5,95%), (7) real estate kode 74, nilainya 6,094 triliun rupiah (5,34 %), (8) konstruksi khusus kode 60, nilainya 4,14 triliun rupiah (3,63%), (9) industri makanan dan minuman lainnya kode 33, nilainya 3,948 triliun rupiah (3,46%), (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial kode 81, nilainya 3,426 triliun rupiah (3%).

Apabila memperhatikan sektor-sektor yang memiliki potensi output dalam 10 besar tersebut dicocokkan dengan visi penunjang pembangunan DIY, maka keempat sektor jasa yang menjadi fokus pembangunan dapat terealisasi. Hal tersebut ditunjukkan dari potensi keempat jasa penunjang visi pembangunan DIY yaitu, jasa pendidikan, perdagangan selain motor/mobil, penyedia makanan dan minuman, dan administrasi pemerintahan, semuanya ada dalam 10 besar penciptaan output. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keempat jasa penunjang tersebut terbukti memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian DIY.

Menurut kriteria BPS (1995), kelima sektor pada urutan satu sampai lima dikategorikan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). Berdasarkan kriteria BPS tersebut, maka 10 sektor besar dalam penciptaan output dikategorikan sebagai sektor unggulan. Oleh karena itu, 10 sektor unggulan

tersebut penting untuk mendapat prioritas pengembangan guna mewujudkan berbagai target pembangunan DIY di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan karena output menjadi faktor penentu baik pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan ekonomi maupun pendapatan per kapita penduduk. Keseluruhan indikator tersebut pada akhirnya akan bermuara pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sukirno (1960) pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan dari Produk Domestik Bruto/PDB (*Gross Domestic Bruto/GDB*) tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut BPS (1995), PDB atau total nilai tambah bruto (NTB) sama dengan total pengeluaran dikurangi total impor.

Lebih jauh Sukirno menegaskan bahwa perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik. Keseluruhan ukuran kemajuan baik menyangkut pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita adalah output.

Menurut statistik pendapatan, output biasa disebut sebagai PDB (BPS, 1995).

### **(1) Identifikasi sektor unggulan menurut nilai tambah bruto**

Menurut BPS (1995) dan BPS Prov DIY (2010) nilai tambah bruto (NTB) merupakan balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi. NTB terdiri dari empat komponen yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan barang dan modal, dan pajak tak langsung serta subsidi. Dalam analisis IO, NTB disebut juga dengan istilah input primer. Total input primer ditambah total input antara adalah total input atau disebut dengan PDRB.

Berdasarkan hasil analisis, total NTB provinsi DIY pada tahun 2010 adalah sebesar 61,136 triliun rupiah. Dari 83 sektor yang dianalisis, sektor jasa pendidikan dengan kode sektor 80 memberikan NTB tertinggi yaitu sebesar 6,272 triliun rupiah (10,26 %). Selanjutnya sebagai kontributor kedua adalah perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor kode 61 sebesar 5,867 triliun rupiah (9,6%). Adapun kontributor ketiga sampai kelima, masing-masing secara berturut-turut adalah: (i) informasi dan komunikasi kode 69, nilainya 4,946 triliun rupiah (8,09%), (ii) penyedia makanan dan minuman kode 68, nilainya 4,609 triliun rupiah (7,54%), (iii) konstruksi gedung dan bangunan sipil

kode 59, nilainya 4,525 triliun rupiah (7,4%).

Berdasarkan kriteria BPS (1995), sektor-sektor yang termasuk kedalam lima besar dalam penciptaan output dan sekaligus NTB dikategorikan sebagai sektor kunci (*key sector*). Berdasarkan hasil identifikasi, lima besar sektor dalam penciptaan output sekaligus juga termasuk dalam lima besar dalam hal penciptaan NTB. Dengan demikian kelima sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor kunci. Dalam penelitian ini, kelima sektor yang dikategorikan sebagai sektor kunci juga dimaknai pula sebagai sektor unggulan.

Berdasarkan hasil identifikasi menurut NTB, maka sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor kunci akan menjadi potensi penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian DIY. Dengan demikian, pengembangan kelima sektor unggulan tersebut penting untuk diprioritaskan pengembangannya.

### **(2) Identifikasi sektor unggulan menurut potensi ekspor**

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbuka sangat berkepentingan dengan ekspor. Dalam konteks pembangunan nasional, ekspor dijadikan sektor penghela dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, semakin tinggi volume ekspor yang dicapai Provinsi DIY menjadi faktor

penting dalam turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Tabel IO Provinsi DIY tahun 2010, ada dua lingkup ekspor yaitu ekspor barang antar negara dan ekspor barang antara provinsi. Di sisi lain, ditinjau dari jenis eskpornya, terdapat dua jenis ekspor yaitu ekspor barang dan ekspor jasa.

Ditinjau dari jenisnya, total ekspor barang mencapai 14,739 triliun rupiah sedangkan ekspor jasa totalnya mencapai 12,678 triliun rupiah. Ditinjau dari lingkup ekspornya, total ekspor barang antara provinsi mencapai 12,575 triliun rupiah, sedangkan total ekspor barang antar negara mencapai 2,163 triliun rupiah.

Ditinjau dari nilainya, total ekspor masih jauh dari total impornya. Berdasarkan pada hasil analisis total impor mencapai 31,698 triliun rupiah. Angka impor ini jauh diatas nilai ekspor. Dengan demikian ditinjau dari perbandingannya, provinsi DIY mengalami defit yang totalnya mencapai 19,536 triliun rupiah. Mencermati angka defisit yang begitu besar, maka sangat penting untuk meningkatkan ekspor dari masing-masing komoditi yang menunjukkan kinerja ekspor yang selama ini menunjukkan volume yang besar.

Berdasarkan hasil analisis, beberapa sektor yang memiliki potensi ekspor di atas rata-rata kemampuan

sektor yang lain adalah: (1) kebudayaan hiburan dan rekreasi kode 82, kontribusi ekspornya mencapai 61,02 %, (2) industri furnitur kode 53, kontribusinya sebesar 48,76 %, (3) industri pakian jadi kode 38, kontribusi ekspornya sebesar 44,64 %, (4) real estate kode 74, kontribusi ekspornya 43,87 %, (5) jagung kode 2, kontribusi ekspornya sebesar 43,17 %, (6) industri makanan dan minuman lainnya kode 33, kontribusi ekspornya 42,72 %, (7) industri tekstil selain tenun dan batik kode 35, kontribusinya 42,34 %, dan (8) angkutan rel kode 63, kontribusinya 40,62 %.

Ketujuh sektor diatas merupakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi ekspor diatas 40 persen. Berdasarkan potensinya yang cukup besar terhadap ekspor provinsi DIY, maka ketujuh sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor unggulan ditinjau dari potensi ekspornya. Dengan demikian, pengembangan ketujuh sektor tersebut patut diperhatikan bahkan semakin ditingkatkan potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi DIY. Potensi ekspor yang tinggi memang sangat besar perannya dalam kemajuan ekonomi wilayah, namun Basri (2010) dalam Prasetyantoko (2010) mengingatkan terlalu tergantung pada potensi ekspor juga tidak baik, khususnya apabila terjadi krisis ekonomi. Basri mencontohkan akibat krisis ekonomi

2008, Indonesia lebih survie daripada Korea dan Singapura karena porsi ekspor Indonesia terhadap PDG lebih rendah dari kedua negara tersebut.

Dari ketujuh sektor yang menunjukkan kontribusi ekspor di atas 40 persen, ternyata sektor kebudayaan hiburan dan rekreasi merupakan yang paling besar kontribusinya terhadap ekspor DIY. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan DIY yang memberikan tekanan pada bidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.

### **(3) Identifikasi sektor unggulan menurut penyerapan tenaga kerja**

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peranan penting dalam proses produksi. Dalam analisis IO, tenaga kerja termasuk dalam komponen input primer, yang nilai pengeluaran untuk tenaga kerja oleh produsen dihitung dalam bentuk upah, gaji, bonus, tunjangan termasuk hasil usaha berupa sewa, bunga, keuntungan baik berupa barang maupun uang.

Berdasarkan BPS Prov DIY (2010), total tenaga kerja yang terserap kedalam 83 kegiatan ekonomi (sektor) totalnya mencapai 1.775.148 orang. Adapun sektor ekonomi yang paling menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor kode 61 sebanyak 285.050 pekerja. Sebaliknya sektor ekonomi yang paling kecil penyerapan tenaga kerjanya

adalah jasa reparasi mesin kode 56 yaitu sebesar 20 orang.

Adapun sepuluh besar sektor ekonomi yang memiliki daya serap potensial terhadap tenaga kerja adalah: (1) perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor kode 61 sebanyak 285.050 orang, (2) padi kode 01 menyerap sebanyak 139.699 orang, (3) jasa pendidikan kode 80 sebanyak 108.719 orang, (4) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kode 79 sebanyak 106.405 orang, (5) penyediaan makanan dan minum kode 68 menyerap 97.467 orang, (6) konstruksi gedung dan bangunan sipil kode 59 menyerap 81.789 orang, (7) unggas dan hasilnya kode 15 menyerap 58.673 orang, (8) ketela pohon kode 3 menyerap 57.786 orang, (9) industri makanan dan minuman lainnya kode 33 menyerap 50.337 orang, (10) buah-buahan kode 7 menyerap 47.207 orang.

Kesepuluh sektor tersebut memiliki peranan penting dalam penyediaan lapangan kerja di provinsi DIY. Oleh karena itu sektor-sektor tersebut dikategorikan sektor unggulan. Dengan demikian pengembangan pada 10 sektor di atas akan menyerap banyak tenaga kerja.

Menurut Keynes (1936), tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Dalam berbagai kajian keadaan *full employment* selalu menjadi prasarat dalam pembahasan ekonomi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keadaan dimana tidak ada pengangguran (idelanya) menjadi penentu kemajuan ekonomi suatu negara.

#### **(4) Identifikasi sektor unggulan menurut dampak pengganda output**

Analisis Dampak pengganda output pada prinsipnya menggambarkan besarnya kenaikan output perekonomian Provinsi DIY akibat adanya peningkatan permintaan satu satuan pada suatu sektor tertentu. Analisis DPO ini mengukur kontribusi masing-masing sektor terhadap penciptaan output perekonomian suatu wilayah, dalam hal ini adalah wilayah DIY untuk setiap satu satuan kenaikan permintaan akhir dari sektor yang bersangkutan. Indikator pengukuran output melalui DPO ini berbeda dengan indikator pengukuran melalui total output. Apabila pengukuran melalui total output hanya menggambarkan seberapa besar kontribusi suatu sektor tertentu terhadap output perekonomian provinsi DIY. Namun pengukuran output melalui indikator DPO dapat menunjukkan besarnya kenaikan output perekonomian suatu akibat adanya kenaikan permintaan akhir suatu sektor tertentu sebesar satu satuan.

Berdasarkan hasil analisis dari 83 sektor ekonomi, maka sektor-sektor ekonomi yang nilai DPO dalam 10 besar adalah: (1) industri beras kode 24 sebesar 1,885, (2) asuransi dan dana pensiun kode 72 sebesar 1,781, (3) industri tepung terigu dan tepung lainnya kode 26 sebesar 1,740, (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial kode 81 sebesar 1,739, (5) industri barang kimia kecuali pupuk dan pestisida kode 44 sebesar 1,687, (6) konstruksi khusus kode 60 sebesar 1,594, (7) industri barang dan barang lainnya dari karet kode 45 sebesar 1,588, (8) industri biji-bijian kupas, coklat dan kembang gula kode 30 sebesar 1,571, (9) jasa keuangan lainnya kode 72 sebesar 1,564, (10) angkutan jalan raya kode 64 sebesar 1,561. Berdasarkan pada potensinya terhadap penciptaan output, maka kesepuluh sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor potensial ditinjau dari nilai DPO.

Industri beras memiliki DPO sebesar 1,83 dapat diinterpretasikan, setiap ada kenaikan permintaan akhir terhadap industri besar sebesar 1 satuan maka output perekonomian wilayah DIY akan meningkat sebesar 1,8 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai DPO beras yang paling tinggi dalam perekonomian DIY menunjukkan bahwa pengembangan industri beras akan memiliki dampak besar terhadap penciptaan output di wilayah provinsi

DIY. Di sisi lain, dominasi sektor industri beras sekaligus menunjukkan bahwa potensi sektor pertanian juga masih sangat dominan di Provinsi DIY.

#### **(5) Identifikasi sektor unggulan menurut indek daya penyebaran dan indek derajat kepekaan**

Indek daya penyebaran (IDP) secara matematis merupakan nilai dari daya penyebaran dinormalkan dengan rata-rata nilai daya penyebaran seluruh sektor. Nilai daya penyebaran diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai unsur matrik kebalikan Leontief menurut baris. Matrik kebalikan Leontief menurut baris juga menunjukkan keterkaitan ke belakang baik keterkaitan langsung maupun keterkaitan tak langsung. Menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010) nilai Daya Penyebaran menunjukkan besarnya kenaikan output perekonomian suatu wilayah sebagai akibat adanya permintaan akhir suatu sektor tertentu. Oleh karena, nilai IDP pada dasarnya nilai daya penyebaran yang dinormalkan maka nilai IDP dapat diperbandingkan antar sektor.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 83 sektor ekonomi dalam perekonomian wilayah DIY, selanjutnya bisa diidentifikasi sektor-sektor yang memiliki nilai IDP dalam kategori 10 besar. Adapun sektor-sektor tersebut adalah: (1) industri beras kode 24

nilainya sebesar 1,3858, (2) asuransi dan dana pensiun kode 72 sebesar 1,3093, (3) industri tepung terigu dan tepung lainnya kode 26 sebesar 1,2794, (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial kode 81 sebesar 1,27852, (5) industri barang kimia kecuali pupuk dan pestisida kode 44 sebesar 1,2399, (6) konstruksi khusus kode 60 sebesar 1,1719, (7) industri barang dan barang lainnya dari karet kode 45 sebesar 1,16751, (8) industri biji-bijian kupas, coklat dan kembang gula kode 30 sebesar 1,1551, (9) jasa keuangan lainnya kode 72 sebesar 1,1500, (10) angkutan jalan raya kode 64 sebesar 1,1481.

Ditinjau dari peringkatnya, sektor industri beras menunjukkan nilai IDP yang paling tinggi diantara 82 sektor yang lain, yaitu sebesar 1,3858. Berdasarkan nilai IDP tersebut dapat diartikan bahwa setiap ada kenaikan permintaan akhir terhadap sektor industri beras sebesar satu satuan, maka besarnya dampak kenaikan output perekonomian DIY akan meningkat sebesar 1,3858 satuan. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kenaikan output yang diciptakan oleh sektor industri beras lebih besar dari kenaikan permintaannya.

Nilai indek derajat kepekaan (IDK) secara matematis merupakan nilai langsung dan tak langsung ke depan yang dinormalkan dengan nilai rata-rata koefisien seluruh sektor. Nilai langsung

dan tak langsung ke depan disebut juga dengan nilai derajat kepekaan suatu sektor. Derajat kepekaan menunjukkan kepekaan atau sensitivitas suatu sektor apabila ada perubahan permintaan akhir masing-masing sektor dalam suatu wilayah. Adapun nilai derajat kepekaan suatu sektor menunjukkan besarnya kenaikan output dari suatu sektor tertentu sebagai akibat adanya perubahan permintaan akhir masing-masing sektor dalam perekonomian suatu wilayah. Oleh karena nilai IDK merupakan nilai derajat kepekaan yang telah distandarkan sehingga, maka nilainya IDK suatu sektor dapat dikomparasikan dengan nilai IDK sektor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis, maka nilai IDK sektor-sektor yang termasuk dalam 10 besar adalah sebagai berikut: (1) sektor perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor kode 61 dengan nilai 2,4909, (2) sektor informasi dan komunikasi dengan kode 69 nilainya 2,33747, (3) sektor penyedia makan dan minum kode 68 dengan nilai 2,15149, (4) angkutan jalan raya kode 64 dengan nilai 1,87219, (5) listrik kode 57 dengan nilai 1,8677, (6) padi kode 01 dengan nilai 1,8510, (7) jasa keuangan lainnya kode 72 nilainya 1,6392, (8) jasa lainnya kode 83 dengan nilai 1,6069, (9) administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib kode 79 dengan

nilai 1,48744, (10) real estat kode 74 dengan nilai 1,4405.

Berdasarkan nilai IDK dapat ditunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor mempunyai nilai yang paling tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang paling sensitif atau peka terhadap perubahan permintaan akhir masing-masing sektor. Nilai IDK sebesar 2,4909 menunjukkan besarnya kenaikan output yang tercipta pada sektor perdagangan besar dan eceran selain motor/mobil apabila ada perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian sebesar satu satuan. Semakin tinggi nilai IDK suatu sektor maka semakin sensitif atau semakin tinggi pula dampak kenaikan output suatu sektor tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

- a. Sektor ekonomi unggulan ditinjau dari potensi total outputnya adalah:
  - (1) sektor konstruksi gedung & bangunan,
  - (2) jasa pendidikan,
  - (3) penyedia makan minum,
  - (4) administrasi pemerintah, pertahanan & jaminan sosial wajib,
  - (5) informasi dan komunikasi,
  - (6) perdagangan eceran besar dan eceran selain mobil/motor,
  - (7) real estate,
  - (8) konstruksi khusus,



- (9) industri makanan dan minuman lainnya, (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
- b. Sektor ekonomi unggulan ditinjau dari potensi NTB adalah: (1) sektor jasa pendidikan (2) perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor, (3) informasi dan komunikasi, (4) penyedia makanan dan minuman, (5) konstruksi gedung dan bangunan sipil.
- c. Sektor ekonomi unggulan ditinjau dari potensi total eksportnya adalah : (1) kebudayaan hiburan dan rekreasi, (2) industri furnitur, (3) industri pakaian jadi, (4) real estate, (5) jagung, (6) industri makanan dan minuman lainnya, (7) industri tekstil selain tenun dan batik, dan (8) angkutan rel.
- d. Sektor ekonomi unggulan ditinjau dari potensi total penyerapan tenaga kerja adalah: (1) perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor, (2) padi, (3) jasa pendidikan, (4) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (5) penyediaan makanan dan minum, (6) konstruksi gedung dan bangunan sipil, (7) unggas dan hasilnya, (8) ketela pohon, (9) industri makanan dan minuman lainnya, (10) buah-buahan.
- e. Sektor ekonomi unggulan ditinjau dari nilai indek daya penyebaran adalah : (1) industri beras, (2) asuransi dan dana pensiun, (3) industri tepung terigu dan tepung lainnya, (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (5) industri barang kimia kecuali pupuk dan pestisida, (6) konstruksi khusus, (7) industri barang dan barang lainnya dari karet, (8) industri biji-bijian kupas, coklat dan kembang gula, (9) jasa keuangan lainnya, (10) angkutan jalan raya.
- f. Sektor ekonomi unggulan ditinjau dari nilai indek derajat kepekaan adalah: (1) industri beras, (2) asuransi dan dana pensiun, (3) industri tepung terigu dan tepung lainnya, (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (5) industri barang kimia kecuali pupuk dan pestisida, (6) konstruksi khusus, (7) industri barang dan barang lainnya dari karet, (8) industri biji-bijian kupas, coklat dan kembang gula, (9) jasa keuangan lainnya, (10) angkutan jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 1995. Analisis Input Output: Teori dan Aplikasi. BPS Pusat Jakarta.
- BPS DIY, 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). BPS Provinsi DIY.
- BPS DIY, 2010. Tabel Input Output daerah Istimewa Yogyakarta Buku I dan II. Kerjasama BPS dengan Bappeda DIY.
- BPS DIY, 2014. Berita Resmi Statistik DIY. BPS DIY.

- BPS Pusat, 2012. *Indonesia Dalam Angka*. BPS Jakarta.
- Budiharsono, Sugeng, 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya*. Universitas Nusa Bangsa. Bogor.
- Chenery, Hollis B., dan Clark, Paul G., 1959. *Interindustry Economics*. Associate Professor of Economics Williams College. Santa Monica, California.
- Daryanto dan Hafizrianda, 2010. *Analisis Input Output & Social Accounting Matrix*. IPB Press.
- Keynes, J.M., 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Dalam Indonesia Edition oleh Gadjah mada University Press.
- Kunarjo, 1996. *Sejarah Perencanaan Pembangunan: Sebuah Tinjauan Singkat*. Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial Prisma, Nomor Khusus 25 Tahun (1971-1996), Tahun XXV 1996. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Leontief, w., 1986. *Input Output Economics*. Secodn Edition. Oxford University Press. Oxford
- Miller, R.E dan P.H. Blair, 1985. *Input Output Analysis: Foundations and Extensions*. Prentice-Hall, Inc., Engliwood Cliffs, New Jersey.
- Presetyantoko, A., 2010. *Ponzi ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Riedel, James, 1992. *Pembangunan Ekonomi di Asia Timur. Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur*. Gramedia, Jakarta.
- Rostow, 1968. *The Stage Of Economic Growth*. Cambaridge At the University Press.
- Setda Prov Jawa Timut, 2009. *Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E. JDIH Biro Hukum*.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Todaro, Michael P., 1986. *Perencanaan Pembangunan Model dan Metode*. Intermedia, Jakarta.
- Widodo, Hg. Suseno Triyono, 1997. *Ekonomi Indonesia: Fakta dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Wibowo, R., Sofyan R., dan Sugeng R., 1992. *Analisis Keterkaitan Sektor Agroindustri di Indonesia*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Perheppi. Perheppi Jakarta.